

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah bangsa demokrasi yang menerapkan makna sistem pemerintahan dari rakyat bagi rakyatnya (Mardenis, 2018), sehingga tidak terlepas dari yang namanya politik. Politik sudah menjadi ciri khas dari Indonesia yang setiap tahunnya bahkan setiap hari ada berita yang dimuat di televisi, koran, dan radio serta di sosial media sekalipun banyak mengenai politik negara ini mulai dari kasus yang menjerat sampai prestasi yang dibangun. Politik tidak lengkap tanpa adanya partai politik, Partai politik termasuk organisasi yang berperan dalam kehidupan berdemokrasi masyarakat Indonesia yang didirikan pertama kali pada 25 Desember 1912. Partai politik adalah sentral demokrasi dimana partai dijadikan perantara masyarakat dengan pemerintah untuk menyampaikan aspirasi masyarakat (Haris, 2020).

Jika berbicara mengenai partai politik tidak terlepas dari masyarakat sebagai pendukung utama partai politik sehingga transparansi dan pertanggungjawaban merupakan hal penting agar partai politik mendapatkan bantuan dana dan dapat dipercaya untuk memegang amanat sebagai pemimpin bangsa. Dikarenakan bantuan yang didapat oleh partai politik bisa saja menjadi bumerang bagi mereka, sehingga digunakan sebagai kepentingan perseorangan, lupa akan tugas-tugas sebagai penyalur aspirasi atau yang berperan dalam membantu masyarakat dalam pemerintahan. Dengan kata lain bahwa perkembangan negara demokrasi tergantung pada kemajuan partainya, dengan demikian hal tersebut harus dibangun, dipelihara dan dikembangkan di atas kepentingan kemajuan rakyat (Suprihatini, 2019).

Dalam suatu organisasi, laporan keuangan adalah inti atas setiap kegiatan. Apabila pelaporan keuangannya baik maka organisasi tersebut juga dianggap baik. Laporan tersebut juga sebuah laporan yang menunjukkan situasi finansial dari organisasi ataupun instansi dalam satu periode tertentu. Selain untuk mengetahui keuangan organisasi, laporan keuangan juga berfungsi untuk melihat

kinerja dari manajemen organisasi tersebut dalam mengelola keuangan yang dimilikinya karena dari laporan keuangan tersebut kita akan mendapatkan informasi mengenai variasi pendapatan serta pengeluaran serta total aktiva yang ada pada organisasi (Kasmir, 2017).

Partai Amanat Nasional (PAN) lahir era reformasi pada 23 Agustus 1998 dan mengikuti pemilu pada tahun 1999 yang sampai sekarang terus berkembang hingga menjadi salah satu partai yang mendapatkan pengakuan bangsa sebagai pemegang politik. Partai Amanat Nasional merupakan salah satu partai politik di Indonesia yang berdasarkan kepada agama yang membawa rahmat untuk alam serta berpedoman dan berpegang pada rakyat yang daulat, adil, maju, serta spiritual. Sehingga pertanggungjawaban atas laporan keuangannya sangat penting dijadikan kebutuhan yang menerapkan uang rakyat secara luas, maka keuangan yang terbuka dijadikan wujud ketaatan pada perundang-undangan partai politik dan UU pemilihan umum serta untuk masyarakat.

Karena pada era sekarang banyaknya kasus korupsi serta tindak suap saat kampanye dan ketidak jujuran dalam hasil pemilu yang melibatkan oknum-oknum partai politik yang menyalahi aturan perundang-undangan. Bahkan adanya politisi dilingkungan legislatif maupun eksekutif yang terjerat kasus korupsi, terjadinya kasus tersebut bukan hanya semata-mata rendahnya moral politik dari seorang politisi namun ada juga sistem politik yang memaksakan para anggota untuk mendapatkan dana yang tidak menjadi hak dirinya digunakan sebagai kepentingan partainya. Oleh sebab itu tingkat keyakinan rakyat pada partai politik mengalami penurunan.

Untuk mengembalikan keyakinan rakyat pada partai politik, dibutuhkan meningkatkan pertanggungjawaban dan transparansi laporan keuangannya sebagai bentuk *good political party governance*. *Good political party governance* merupakan pengelolaan partai politik yang baik seiring pada pengembangan pengelolaan pemerintahan secara benar. Maka pengembangan *good political party governance* menjadi hal yang sangat penting agar pemerintahan terbebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme melalui nilai-nilai yang dilembagakan seperti demokrasi, ketaatan terhadap hak asasi manusia, akuntabilitas, transparansi serta

efisiensi dan efektivitas yang lebih besar. Karena didalam Alqur'an surah al ahzab: 72 sudah dijelaskan bahwa manusia pengemban amanat terbesar dibumi, yaitu:

Q.S AL-Ahzab ayat 72

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ ۗ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا

Artinya : *“Sesungguhnya Kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya (berat), lalu dipikullah amanat itu oleh manusia. Sungguh, manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh”*.(Ningsih, 2012)

Dari ayat tersebut menunjukkan bahwa manusia pemikul amanat yang besar oleh sebab itu sama halnya dengan partai politik yang dibangun dan dijalankan oleh manusia sehingga memikul amanat dan tanggungjawab yang besar pula bukan hanya dihadapan manusia namun dihadapan Allah. Partai politik harus mampu mempertanggungjawabkan apa yang menjadi tugas dan janjinya terutama pada keuangan yang diterima dan dikeluarkan oleh mereka. Pengelolaan keuangan yang dilaksanakan mereka berdasarkan pada kebijakan UU adalah bentuk dari pertanggungjawaban dari amanah yang diembannya.

Dasar pedoman laporan keuangan partai politik adalah ISAK 35 tentang Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba (nirlaba) yang menggantikan PSAK No. 45 Terdahulu sebagai pedoman untuk menyusun laporan keuangan organisasi nonlaba, yang mana organisasi ini sumber dananya untuk menjalankan aktivitas operasional ialah melalui sumbangan anggota maupun sumbangan lainnya yang tidak mengharapkan balasan atau laba atas apa yang mereka berikan, bukan seperti organisasi bisnis yang menanam modal atau saham maka mereka akan mengharapkan keuntungan dari apa yang mereka

tanam. Oleh karena itu penyumbang organisasi nirlaba juga ingin adanya terdapat sikap tanggung jawab atas uang yang sudah mereka sumbangkan.

Membangun transparansi partai politik tidaklah mudah, butuh waktu yang lama dan berkelanjutan oleh beberapa pihak dari partai dan juga pemerintahan sehingga akan terbentuknya tata kelola partai politik yang baik (*good political party governance*) yang dipercaya masyarakat. Melihat dari betapa pentingnya sebuah pertanggungjawaban transparansi laporan keuangan partai politik, maka penulis memiliki ketertarikan untuk membahas laporan keuangan partai politik dikarenakan laporan keuangan partai politik jarang dibahas namun sebenarnya laporan keuangan tersebut sangat penting untuk dibahas sehingga peneliti membahas secara lanjutan tentang transparansi atas pertanggungjawaban partai politik namun peneliti memilih salah satu partai modern yang lahir pada era reformasi yang menganut asas agama yaitu Partai Amanat Nasional (PAN) kabupaten Asahan sebagai objek penelitian, yang dinilai partai ini cukup berperan dalam perpolitikan di Indonesia.

Setelah melakukan wawancara terhadap ketua Partai Amanat Nasional Kabupaten Asahan, diketahui bahwa partai PAN untuk pemilu periode tahun 2019-2024 mendapat bagian 5 kursi untuk menduduki DPRD Kabupaten Asahan, partai ini juga memegang 39.900 suara dan jumlah bantuan yaitu 2.000/suara, untuk menghitung jumlah anggaran yang diterima partai PAN dengan mengalikan jumlah suara sama jumlah bantuan persuara untuk 6 bulan. Sehingga ketua PAN menyebutkan hal itu belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan politik.

Untuk mengetahui berapa besarnya rencana anggaran penggunaan bantuan keuangan Partai Amanat Nasional Kabupaten Asahan bisa ditinjau dari tabel berikut ini.

**Tabel 1.1 Rencana Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik Partai
Amanat Nasional Kabupaten Asahan Tahun Anggaran 2021,
Bulan Januari s/d Juni 2021**

NO	RENCANA PENGGUNAAN	JUMLAH UANG (Rp)	KET
1	2	3	
A	Pendidikan Politik		
	a. Seminar	-	
	b. Loka karya	-	
	c. Dialog interaktif	Rp. 2.000.000,-	
	d. Sarasehan, dan	-	
	e. Workshop	Rp.39.500.000,-	
	f. Kegiatan pertemuan parpol lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi parpol	-	
B	Operasional Sekretariat		
	1. Administrasi Umum		
	a. Keperluan ATK	Rp. 500.000,-	
	b. Rapat internal sekretariat	-	
	c. Transportasi dalam rangka mendukung kegiatan operasional sekretariat	-	
	d. Sewa kantor	Rp.15.000.000,-	
	e. Honor tenaga administrasi sekretariat partai politik yang berkompeten dibidang pengelolaan keuangan	Rp. 7.500.000,-	
	2. Langganan Daya dan Jasa		
	a. Telepon dan listrik	Rp. 500.000,-	
	b. Air minum	Rp. 450.000,-	
	c. Jasa pos dan giro		
	d. Surat menyurat		
	e. Media cetak dan elektronik	Rp. 2.900.000,-	
	3. Pemeliharaan Data dan Arsip		
	4. Pemeliharaan Peralatan Kantor		
	JUMLAH	Rp. 68.349.159,-	

Sumber: DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Asahan

Dari tabel 1.1 dapat kita lihat bagaimana kegiatan anggaran yang dibutuhkan oleh Partai Amanat Nasional Kabupaten Asahan untuk menjalankan partainya dalam masa satu semester (6 bulan) anggaran yaitu sebanyak Rp. 68.349.159,-. Partai Amanat Nasional melaporkan atas pertanggungjawaban transparansi keuangan mereka yang termuat dalam Laporan Pertanggungjawaban

(LPJ) atas bantuan keuangan yang diterimanya dari anggaran APBD pada setiap bulan Januari kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (BAKESBANGPOL) yang kemudian akan diserahkan kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) untuk diaudit. Bantuan yang diterima oleh Partai Amanat Nasional dari anggaran negara harus habis dalam masa satu periode persemester.

Secara filosofis, partai politik dibentuk sebagai wujud nyata kedaulatan rakyat bukan wujud kekuatan ekonomi. Apabila suatu partai mempunyai kewajiban dalam bertindak terbuka untuk mengelola keuangan, hal ini sebagai pemikat rakyat untuk memberikan keyakinan pada partai politik. Sementara akuntansi berperan dan berfungsi untuk partai bisa ditinjau berdasarkan aspek eksternal dan internal. Sehingga timbul sebuah masalah pada penelitian ini yakni bagaimana transparansi dalam pengelolaan keuangan partai politik dijadikan landasan *good political party governance*, sedangkan Partai Amanat Nasional tidak membuat laporan lain seperti yang tertuang dalam UU No. 2 Tahun 2011 pasal 39 dan pada ISAK No 35. Pada tabel 1.1 Partai Amanat Nasional hanya memperlihatkan beban saja namun tidak memperlihatkan penerimaan /pendapatan yang mereka terima. Serta Partai Amanat Nasional juga tidak membuka akses media kepada publik mengenai sumbangan yang diterima (daftar penyumbang).

Peneliti mengkaji mulai dari pencatatan keuangan sampai output yang dihasilkan serta bagaimana transparansi partai tersebut untuk mencari kepercayaan masyarakat. Pada ISAK 35 telah dijelaskan bahwasanya masing-masing organisasi nirlaba diharuskan melakukan penyajian keuangan agar bisa dilakukan evaluasi dan penilaian atas pelaporan keuangan yang dilaksanakan dari partai tersebut telah akuntabel berdasarkan kebijakan yang berlaku.

B. Identifikasi Masalah

Masalah dalam penelitian yang akan peneliti susun ini mampu diidentifikasi masalahnya sebagai berikut:

1. Kurangnya transparansi dari keuangan partai politik
2. Masih banyaknya akses tertutup mengenai keuangan partai politik
3. Laporan keuangan partai politik tidak berdasarkan pada ISAK No. 3

C. Batasan Masalah

Agar penelitian ini bisa dilaksanakan dengan lebih terfokus dan lebih dalam, maka peneliti memberi batasan masalah yaitu hanya terkait pada pengungkapan laporan keuangan partai politik tersebut.

D. Perumusan Masalah

Dari latar belakang permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka peneliti dapat menarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengungkapan laporan keuangan berdasarkan ISAK No. 35 pada Partai Amanat Nasional di Kabupaten Asahan?
2. Bagaimana transparansi atas pengungkapan laporan keuangan Partai Amanat Nasional di Kabupaten Asahan?
3. Apakah pengungkapan transparansi laporan keuangan sudah sesuai pada landasan *good political party governance* pada Partai Amanat Nasional Kabupaten Asahan?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang akan dicapai oleh peneliti ialah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan pengungkapan laporan keuangan berdasarkan ISAK No. 35 pada Partai Amanat Nasional di Kabupaten Asahan.
2. Untuk menjelaskan transparansi atas pengelolaan laporan keuangan Partai Amanat Nasional di Kabupaten Asahan.
3. Untuk menjelaskan pengungkapan transparansi laporan keuangan sebagai dasar *good political party governance* pada Partai Amanat Nasional di Kabupaten Asahan.

F. Manfaat Penelitian

Adapun dari penelitian ini bisa kita ambil manfaat sebagai berikut:

1. Dari segi teoritis, penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat dalam kajian lebih lanjut serta dapat memberikan tambahan pengetahuan, pemahaman

dalam pengelolaan keuangan yang transparansi yang mencerminkan *good political party governance*.

2. Dari segi praktis

- a. Untuk partai politik, dimana riset ini diharapkan bisa bermanfaat dan meningkatkan pemahaman mengenai penerapan sistem transparansi. Dengan penerapan tersebut pengelola keuangan agar menyajikan laporan keuangannya dengan sangat bertanggungjawab dan transparan kepada para pengguna laporan keuangan yang diterapkan untuk mengambil keputusan dalam pengelolaan partai yang transparansi dan bertanggungjawab. Dan diharapkan dengan penerapan ini tingkat kepercayaan masyarakat akan bertambah terhadap partai politik yang nantinya akan melahirkan kader-kader sebagai pemimpin negara.
- b. Bagi pemerintah, manfaat yang dapat dirasakan oleh pemerintah ialah dengan adanya penelitian ini maka meningkatkan daya tanggungjawab partai politik dalam mempertanggungjawabkan laporan keuangannya sehingga terciptanya tata kelola partai politik yang baik yang merupakan satu dari berbagai hal terpenting untuk penciptaan pengelolaan pemerintahan yang baik (*good governance*), maka negara ini akan lebih maju, bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
- c. Bagi akademisi, diharapkan penelitian ini bermanfaat dalam pengetahuan mengenai sistem akuntabel dan transparan pengelolaan keuangan partai politik, serta riset ini bisa dijadikan referensi dalam riset berikutnya. Untuk penulis, riset ini berguna dalam meningkatkan wawasan serta informasi bagi penulis tentang pelaporan keuangan partai politik yang transparansi, akuntabilitas dan mencerminkan *good political party governance* (tata kelola partai politik yang baik).